

Evaluasi Sistem Administrasi Pengajuan Hibah dalam Mendukung Pengembangan Sistem Berbasis Online pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah

Zahra Widya Putri^{a*}, Vivy Kristinae^a, Selly Aulia Margareta^a, Fricella Aprianda^a

^a Universitas Palangka Raya, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10-02-2026

Revised : 02-03-2026

Accepted : 07-03-2026

Keywords: Administration, Grants, Management Information Systems, Online

Kata Kunci: Administrasi, Hibah, Online, Sistem Informasi Manajemen

Corresponding Author:

zahrawidyaputri903@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the administrative process of grant applications and evaluate the effectiveness of the system implemented at the Public Welfare Bureau of the Regional Secretariat of Central Kalimantan. The study employs a qualitative approach with a descriptive method, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The results indicate that the grant application process has been carried out in accordance with established procedures; however, it is still dominated by a manual system that is less efficient in handling a high volume of applications. Although an online-based grant application system has been developed, its implementation has not been optimal due to the lack of full integration, limited socialization, and users' readiness constraints. This study emphasizes the importance of developing a more integrated and adaptive online system to improve effectiveness, efficiency, and transparency in regional grant management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses administrasi pengajuan hibah serta mengevaluasi efektivitas sistem yang digunakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan hibah telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun masih didominasi oleh sistem manual yang kurang efisien dalam mengelola volume pengajuan yang tinggi. Meskipun sistem pengajuan hibah berbasis online telah dikembangkan, implementasinya belum optimal karena belum terintegrasi secara menyeluruh, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan kesiapan pengguna. Penelitian ini menegaskan

pentingnya pengembangan sistem berbasis online yang lebih terintegrasi dan adaptif sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan hibah daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan daerah adalah pemberian hibah kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan. Hibah memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan sosial dan pembangunan berbasis masyarakat, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

Secara regulatif, pengelolaan hibah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketertiban administrasi. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan hasil, tetapi juga dengan proses pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan operasional.

Dalam praktiknya, pengelolaan hibah di daerah menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam struktur belanja pemerintah. Sebagai contoh, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan dana hibah sebesar lebih dari Rp87,6 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian masih menyisakan dana sekitar Rp12,2 miliar yang dikembalikan ke kas daerah. Selain itu, pada tingkat pemerintah kota, seperti di Palangka Raya, alokasi hibah tahun 2025 mencapai sekitar Rp83,6 miliar untuk berbagai lembaga penerima. Data tersebut menunjukkan bahwa hibah merupakan komponen anggaran dengan nilai yang besar dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, tingginya alokasi dana hibah tersebut diikuti dengan tingginya jumlah pengajuan yang mencapai lebih dari 300 proposal setiap tahun, dengan jumlah penerima yang disetujui berkisar antara 200 hingga 300, menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan hibah tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga dengan kemampuan sistem administrasi dalam mengelola volume pengajuan yang tinggi secara efektif dan terstruktur.

Proses pengajuan hibah sendiri melibatkan berbagai tahapan administratif yang berjenjang, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi, pembahasan anggaran, hingga

pencairan dana melalui mekanisme SPP, SPM, dan SP2D. Struktur proses ini pada dasarnya dirancang untuk menjaga akuntabilitas dan ketertiban pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kompleksitas tahapan tersebut memerlukan dukungan sistem administrasi yang memadai agar tidak menimbulkan keterlambatan maupun beban kerja yang tinggi.

Beberapa kondisi empiris menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi hibah. Hal ini terlihat dari masih adanya penyesuaian berkas pada tahap pengajuan, kebutuhan verifikasi ulang, serta tantangan dalam proses pertanggungjawaban setelah pencairan dana. Selain itu, aspek pengelolaan dokumen dan distribusi beban kerja juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam mendukung kelancaran proses secara keseluruhan. Kondisi ini tidak menunjukkan kelemahan secara langsung, melainkan mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap sistem yang ada agar dapat berjalan lebih optimal.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah telah mulai menginisiasi penggunaan sistem berbasis digital dalam pengelolaan hibah sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik. Digitalisasi diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat alur pelayanan. Namun, implementasi sistem berbasis online dalam pengajuan hibah masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut, baik dari sisi kesiapan pengguna, mekanisme administrasi, maupun integrasi dengan prosedur yang telah ada.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan hibah yang lebih baik. Meskipun demikian, dalam konteks pengajuan hibah daerah, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih spesifik bagaimana sistem administrasi yang berjalan saat ini dapat dievaluasi dan dikembangkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional di lapangan.

Dengan demikian, perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap proses administrasi pengajuan hibah serta evaluasi terhadap sistem yang digunakan, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan sistem berbasis online. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi kondisi yang ada, tetapi juga pada upaya memahami bagaimana sistem tersebut dapat ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi sistem administrasi pengajuan hibah guna mendukung pengembangan sistem yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah daerah.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana proses administrasi pengajuan hibah berlangsung, mulai dari mekanisme, kendala yang dihadapi, hingga upaya pengembangannya dalam kondisi nyata di lapangan.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara sistematis, khususnya pada sistem administrasi hibah yang diterapkan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana proses pengajuan hibah berjalan serta menilai sejauh mana sistem yang ada sudah mendukung proses tersebut. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan mengarahkan pengembangan sistem pengajuan hibah berbasis online.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

- Penelitian ini dilaksanakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu unit kerja pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan hibah kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga keagamaan.
- Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi ini terlibat langsung dalam seluruh tahapan pengelolaan hibah, mulai dari penerimaan proposal, proses administrasi dan verifikasi, hingga pencairan dan pengawasan pertanggungjawaban dana hibah.
- Fokus penelitian diarahkan pada sistem administrasi pengajuan hibah, termasuk alur proses, mekanisme kerja, serta evaluasi terhadap sistem yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan hibah daerah.

2. Waktu dan Sumber Data Penelitian

- Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada periode Februari hingga Maret 2026
- Rentang waktu penelitian mencakup beberapa tahapan, yaitu:
 - ✓ tahap persiapan penelitian (penyusunan instrumen dan perizinan),
 - ✓ tahap pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi),
 - ✓ serta tahap analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

Penentuan waktu penelitian disesuaikan dengan aktivitas operasional instansi, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi aktual dalam proses

pengelolaan hibah.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Data kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait proses administrasi pengajuan hibah, termasuk dinamika yang terjadi di lapangan.

Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan hibah.

1. Sumber Data Utama

Data utama diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hibah, yaitu:

- Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Narasumber merupakan pegawai yang memiliki peran dalam proses administrasi hibah, seperti penginputan data permohonan, verifikasi berkas, penyusunan dokumen pencairan, serta pengelolaan pertanggungjawaban hibah. Informasi yang diperoleh meliputi:
 - alur pengajuan hibah
 - mekanisme administrasi yang digunakan
 - kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan hibah
 - serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas system

Dari hal tersebut, ditemukan 3 (tiga) informan/narasumber yang membantu pengambilan data dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Tambahan

Data tambahan digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data utama serta mendukung proses analisis. Sumber data ini diperoleh dari berbagai dokumen dan referensi tertulis, antara lain:

- dokumen administrasi pengajuan hibah
- data dan daftar penerima hibah
- arsip dan laporan internal instansi
- peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hibah daerah
- serta literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan

Data tambahan ini berfungsi untuk memberikan validasi terhadap data utama serta memperkaya analisis mengenai sistem administrasi pengajuan hibah yang diterapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam terkait proses administrasi pengajuan hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan hibah, khususnya pegawai pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang menangani proses administrasi, verifikasi, hingga pencairan dana hibah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait alur pengajuan hibah, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas sistem administrasi. Dalam penelitian ini, terdapat 3 informan atau narasumber.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses administrasi pengajuan hibah di lingkungan kerja Biro Kesejahteraan Masyarakat. Pengamatan difokuskan pada alur pelayanan, pengelolaan dokumen, serta aktivitas yang berkaitan dengan proses verifikasi dan pencairan hibah. Melalui observasi, peneliti dapat memahami kondisi nyata di lapangan serta melihat bagaimana sistem administrasi dijalankan secara langsung.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi berkas pengajuan hibah, format administrasi, data penerima hibah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses pengelolaan hibah. Selain itu, dokumentasi juga mencakup arsip dan data yang dapat mendukung analisis terhadap sistem administrasi yang diterapkan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama untuk mengolah data kualitatif secara sistematis dan mendalam:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, disederhanakan, serta difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang berkaitan dengan proses administrasi pengajuan hibah, kendala yang dihadapi, serta sistem yang digunakan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan agar data menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian narasi yang sistematis. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami

alur proses pengajuan hibah, mengidentifikasi pola yang muncul, serta melihat keterkaitan antar temuan di lapangan. Dengan penyajian yang terstruktur, analisis dapat dilakukan secara lebih jelas dan mendalam.

3. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti menelaah berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan hibah dan keuangan daerah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan di lapangan serta sebagai dasar dalam melakukan analisis dan pembahasan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi terus diuji melalui proses verifikasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan keandalan yang baik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Proses Pengajuan Hibah

Proses pengajuan hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui tahapan yang cukup panjang dan berjenjang. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan proposal oleh pemohon yang ditujukan kepada kepala daerah, kemudian dilakukan pencatatan dan disposisi ke bagian terkait, dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi, pembahasan anggaran bersama pihak terkait, hingga penetapan penerima melalui keputusan kepala daerah. Setelah penetapan, proses pencairan dana masih harus melalui mekanisme keuangan daerah, seperti penerbitan dokumen administrasi hingga dana dapat disalurkan kepada penerima.

Berdasarkan temuan di lapangan, jumlah pengajuan hibah setiap tahun mencapai lebih dari 300 proposal. Namun, jumlah yang disetujui berkisar antara 200 hingga 300 penerima, tergantung pada pagu anggaran yang tersedia. Tingginya jumlah pengajuan ini menunjukkan bahwa hibah memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan beban administratif yang cukup besar bagi instansi pengelola.

Jika dianalisis lebih lanjut, banyaknya tahapan dalam proses pengajuan hibah pada dasarnya bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Namun, di sisi lain, kompleksitas tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidakefisienan, terutama ketika jumlah pengajuan meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara aspek pengendalian dan efisiensi dalam sistem administrasi hibah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah membutuhkan sistem yang terstruktur agar pengalokasian anggaran dapat berjalan

efektif, namun juga harus diimbangi dengan efisiensi proses agar tidak menghambat pelayanan publik (Remanta, 2024).

Evaluasi Sistem Administrasi Pengajuan Hibah

Sistem administrasi pengajuan hibah yang diterapkan saat ini masih didominasi oleh proses manual dengan penggunaan dokumen fisik pada setiap tahapan. Sistem ini memberikan kejelasan dalam prosedur karena setiap tahapan memiliki bukti administrasi yang lengkap. Dari sisi pengendalian, hal ini menjadi kelebihan karena memudahkan dalam proses audit dan pemeriksaan.

Namun, dalam pelaksanaannya, sistem manual menunjukkan beberapa keterbatasan, terutama dalam hal efisiensi dan fleksibilitas. Proses administrasi menjadi sangat bergantung pada kelengkapan berkas fisik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen, proses harus diulang dari tahap tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan serta memperlambat proses pelayanan.

Selain itu, sistem manual juga belum mampu mengakomodasi pengelolaan data secara terintegrasi. Data pengajuan, verifikasi, hingga pencairan masih tersebar dalam bentuk dokumen fisik, sehingga menyulitkan dalam proses pencarian, monitoring, dan evaluasi data secara cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang ada lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur daripada efisiensi proses.

Dalam hal ini, sistem administrasi yang baik tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek akuntabilitas, tetapi juga harus mampu mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas sistem administrasi dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Dady, 2023). Dengan demikian, sistem yang ada saat ini sudah mendukung aspek akuntabilitas, namun masih memerlukan pengembangan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan.

Kendala dalam Proses Pengajuan Hibah

Dalam pelaksanaan pengajuan hibah, terdapat beberapa kendala yang secara langsung mempengaruhi kelancaran proses. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Hal ini menyebabkan proses verifikasi tidak dapat dilakukan secara langsung dan memerlukan perbaikan berkas, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian.

Kendala ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mampu memfasilitasi pemohon dalam memahami dan memenuhi persyaratan administrasi secara tepat. Tidak adanya sistem yang secara otomatis memandu atau memvalidasi kelengkapan berkas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesalahan berulang.

Selain itu, kendala juga ditemukan pada tahap pertanggungjawaban, khususnya dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Keterlambatan dalam

penyampaian SPJ menunjukkan bahwa pengawasan dan monitoring terhadap penerima hibah masih belum optimal. Hal ini berpotensi menghambat proses audit serta menimbulkan risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi internal, tingginya jumlah pengajuan yang harus diproses serta keterbatasan dalam pengelolaan dokumen menyebabkan meningkatnya beban kerja pegawai. Kondisi ini berdampak pada efektivitas kerja serta berpotensi menimbulkan kesalahan administratif.

Jika dilihat secara keseluruhan, kendala yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan bersumber pada sistem administrasi yang belum terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem serta mekanisme pengelolaan yang digunakan (Gultom, 2023).

Analisis Pengembangan Sistem Berbasis Online

Berdasarkan hasil evaluasi, sistem administrasi pengajuan hibah yang masih didominasi oleh proses manual menunjukkan perlunya pengembangan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah pengembangan sistem pengajuan hibah berbasis online.

Sistem berbasis online memiliki potensi untuk menyederhanakan proses administrasi, terutama dalam tahap pengajuan dan verifikasi. Melalui sistem ini, pemohon dapat mengunggah dokumen secara langsung, sementara sistem dapat dirancang untuk melakukan validasi otomatis terhadap kelengkapan berkas. Hal ini dapat mengurangi kesalahan administratif serta mempercepat proses verifikasi.

Selain itu, sistem online juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih terintegrasi, sehingga memudahkan dalam monitoring, evaluasi, serta pelaporan. Dengan adanya sistem yang terpusat, proses pencarian data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Lebih lanjut, sistem berbasis online juga dapat meningkatkan transparansi, karena proses pengajuan dan status permohonan dapat dipantau secara langsung oleh pemohon. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan hibah.

Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, terutama dalam aspek pengelolaan data dan transparansi (Pashya et al., 2024). Dengan demikian, pengembangan sistem berbasis online bukan hanya sebagai inovasi, tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas sistem administrasi hibah.

Namun demikian, dalam implementasinya, sistem online tersebut belum berjalan secara optimal. Berdasarkan temuan di lapangan, sistem yang telah dikembangkan masih sebatas sebagai sarana penampungan awal proposal dan belum terintegrasi secara penuh

dengan seluruh tahapan administrasi hibah. Hal ini menyebabkan proses tetap harus dilanjutkan secara manual, terutama pada tahap verifikasi dan pencairan yang membutuhkan dokumen fisik dan tanda tangan langsung.

Selain itu, meskipun sistem pengajuan berbasis online telah tersedia, dalam praktiknya pemohon tetap diharuskan datang langsung ke kantor pada tahap tertentu, khususnya untuk proses penandatanganan dokumen administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem online belum sepenuhnya mampu menggantikan proses manual, melainkan masih berjalan secara paralel. Akibatnya, efisiensi yang diharapkan dari digitalisasi belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, kendala lain yang ditemukan adalah belum adanya sosialisasi yang merata kepada masyarakat terkait penggunaan sistem online tersebut. Akibatnya, sebagian besar pemohon masih menggunakan metode konvensional dengan datang langsung ke kantor. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem online belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alternatif utama dalam pengajuan hibah.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah keterbatasan akses dan kemampuan pengguna, terutama bagi pemohon dari kalangan tertentu yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis digital. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan sistem online secara menyeluruh. Di sisi internal, sistem yang dikembangkan juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan administrasi, sehingga masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut.

Jika dianalisis lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketersediaan sistem, tetapi pada tahap implementasi dan kesiapan pengguna. Sistem online yang belum berjalan optimal menyebabkan potensi efisiensi yang diharapkan belum dapat tercapai, sehingga proses administrasi masih bergantung pada sistem manual.

Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik apabila didukung oleh kesiapan sistem dan pengguna (Pashya et al., 2024). Oleh karena itu, pengembangan sistem pengajuan hibah berbasis online perlu dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek sosialisasi, pelatihan pengguna, serta integrasi dengan prosedur administrasi yang telah ada.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses administrasi pengajuan hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan sesuai prosedur, namun masih didominasi oleh sistem manual yang kurang efisien dalam mengelola jumlah pengajuan yang tinggi. Meskipun sistem pengajuan hibah berbasis online telah dikembangkan, implementasinya belum optimal karena belum terintegrasi

secara menyeluruh, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan kesiapan pengguna. Penelitian ini terbatas pada satu instansi dan belum mengkaji secara mendalam aspek teknis sistem digital yang digunakan.

Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan pengembangan sistem pengajuan hibah berbasis online yang lebih terintegrasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan pengelolaan administrasi dan dukungan sumber daya agar proses pengelolaan hibah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News Kalimantan Tengah. (2024). *KPU Provinsi Kalteng kembalikan sisa hibah Pilkada Rp12,2 miliar*. Diakses 18 Maret 2026, pukul 09.00 WIB, dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/758397/kpu-provinsi-kalteng-kembalikan-sisa-hibah-pilkada-rp122-miliar>
- Dady, J. (2023). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/NMaR/article/view/4463>
- Gultom, L. L. (2023). Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. <https://doi.org/10.55904/nautical.v2i9.617>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diakses 16 Maret 2026, pukul 12.00 WIB, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/152742/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pashya, N. P., Nuri, H., Arsyah, M., & Mariana. (2024). Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1375>
- Pemerintah Kota Palangka Raya. (2025). *Pemerintah Kota Palangka Raya tetapkan 111 penerima hibah tahun 2025 total alokasi mencapai Rp83,6 miliar*. Diakses 15 Maret 2026, pukul 08.00 WIB, dari <https://setda.palangkaraya.go.id/pemerintah-kota-palangka-raya-tetapkan-111-penerima-hibah-tahun-2025-total-alokasi-mencapai-rp-836-miliar/>
- Remanta, O. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/1193>
- Setyowati, L., Istihika, W., & Pratiwi, R. (2017). The effect of accountability, transparency, and supervision on budget performance. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 10(1), 1–12.

<https://doi.org/10.15294/jejak.v10i1.9134>